



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**KECAMATAN SOLOR SELATAN**



**RENCANA STRATEGIS**  
**(RENSTRA)**  
**2017-2021**



**KECAMATAN SOLOR SELATAN**  
**2017**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menjadi titik balik perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang tersebut peran Pemerintah Pusat terhadap berbagai aspek Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat adalah sangat dominan, sementara dilain pihak aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah kurang diperhatikan.

Pada saat ini kondisi tersebut telah berubah, Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan serta potensi daerah.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah ini menuntut Pemerintah Daerah mampu menyusun program pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan daerah. Program pembangunan yang disusun harus sinkron dengan program pembangunan propinsi dan pusat, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

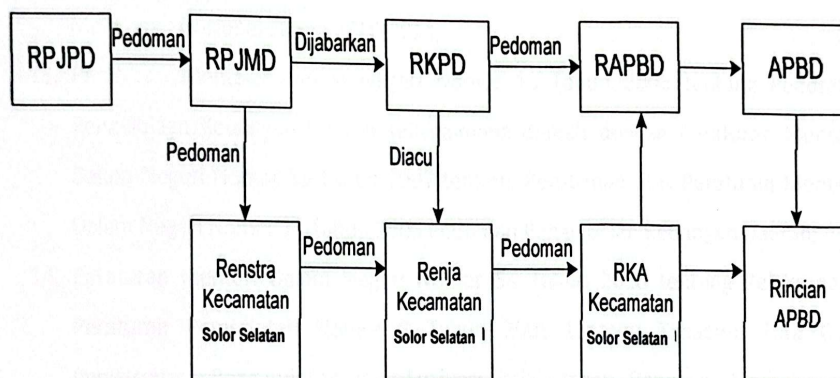
Kecamatan merupakan salah satu instansi teknis di daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menyusun kebijakan dan program pembangunan di Kecamatan secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang dan pelaksanaan otonomi di daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Solor Selatan Tahun Anggaran 2017 - 2022 merupakan Implementasi dari Rencana Strategi Kecamatan Solor Selatan dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya dan merupakan bagian dari upaya merealisasikan misi Kecamatan Solor Selatan dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Solor Selatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan.

Rencana Strategis ini posisinya sangat strategis yaitu sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD/Kecamatan Tahunan selama 5 (lima) tahunan. Disamping itu dokumen ini juga sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baik tahunan maupun lima tahunan untuk mengukur tingkat capaian kinerja SKPD antara rencana capaian kinerja dalam Renstra dengan riil realisasi capaian kinerja yang ada.

Alur pikir penyusunan Renstra Kecamatan Solor Selatan Tahun 2017 - 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Solor Selatan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;



18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022.
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 tahun 2016 tentang Uraian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan( Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 98 );

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Kecamatan Solor Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan transparan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Solor Selatan adalah :

1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati pada tingkat kecamatan;
2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Solor Selatan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan

kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,

4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab1. Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

2. Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

3. Bab 3. Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Memuat analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RT/RW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

4. Bab 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Memuat Visi dan Misi lembaga, perumusan sasaran/target serta keterkaitan Misi, Kebijakan dan Strategi implementasinya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solor Selatan, serta strategei dan kebijakan kedepan untuk perencanaan pembangunan

5. Bab 5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

6. Bab 6. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,

Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. Bab 7. Penutup



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

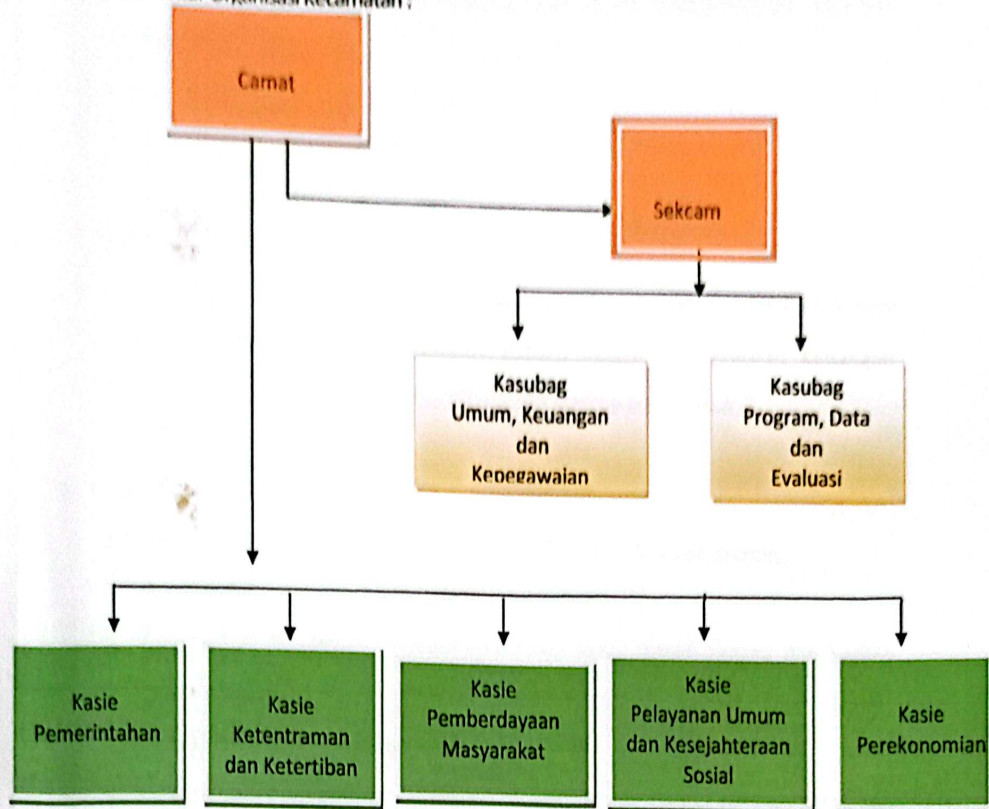
#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOLOR SELATAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 98 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 98, maka struktur organisasi Kantor Kecamatan Solor Selatan sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Seksi Perekonomian

(2) Struktur Organisasi Kecamatan :



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Ssusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun)Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan, 2016 Nomor 98, Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati di wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai :

1. Tugas :

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;

2. Fungsi :

- a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan dan;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Sekretaris Kecamatan.

- a. Membantu Camat dalam menyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi urusan Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan serta Penyusunan Program dan Pelaporan lingkup kecamatan;

5. Fungsi Sekretaris Kecamatan :

- a. Penyusun rencana kerja kesekretariatan pemerintahan kecamatan;
- b. Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usah, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

6. Tugas Sub Bagian Program, dan Evaluasi;

- a. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan program, Data dan Evaluasi Kecamatan;

7. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

- a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
- c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Keuangan :

- a. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penetaan barang milik negara/daerah serta urusan Keuangan;

9. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

- a. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;



- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
  - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
  - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
10. Tugas Kasi Pemerintahan :
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ,pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
11. Fungsi Kasi Pemerintahan:
- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
12. Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
13. Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
14. Tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
15. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat:
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat ;dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
16. Tugas Kasi Kesejahteraan Sosial dan Umum :
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pelayanan umum dan Kesejahteraan Sosial;
17. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial:
- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
18. Tugas Kasi Perekonomian:
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perekonomian:
19. Fungsi Kasi Perekonomian:
- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat ;dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
16. Tugas Kasi Kesejahteraan Sosial dan Umum :
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pelayanan umum dan Kesejahteraan Sosial;
17. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial:
- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
18. Tugas Kasi Perekonomian:
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perekonomian:
19. Fungsi Kasi Perekonomian:
- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;



## 2.2. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Solor Selatan memiliki sumber daya manusia dan asset/modal sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honor di Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2017, adalah sejumlah 22 orang. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 di halaman berikut :

**Tabel .2.1**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Solor Selatan**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2017**

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	1	
2.	III	7	
3.	II	7	
4.	I	--	
5.	Honorer	8	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	

Sumber : Kecamatan Solor Selatan 2017

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Solor Selatan**  
**Menurut Pendidikan Tahun 2018**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SLTA	8	
2.	D III	1	
3.	S1	13	5 PNS +8 honor
4.	S2	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	

Sumber : Kecamatan Solor Selatan 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Kecamatan Solor Selatan belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Prasarana dan sarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Solor Selatan yang tersedia memadai sangat membantu aktivitas pelayanan yang cepat, tepat dan memadai. Kondisi prasarana dan sarana pendukung berupa : tanah, gedung kantor dan sarana penunjang lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Asset/Modal Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur**

No	Asset/Modal	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	1000 m <sup>2</sup>	√			
2	Gedung Kantor	-	√			
	Rumah Dinas Camat	-	√			
3	Prasarana dan Sarana Penunjang					
1.	Sepeda Motor	6	√			
2.	Komputer	2	√		√	
3.	Laptop	1	√			
4.	Printer	7	√			
6.	Genset	0				
7.	Meja Kerja	9	√			
8.	Lemari Arsip	9	√			
9.	Lemari Brader	1	b			
9.	Meja rapat	1	√			
10.	Kursi kerja Kayu	4	√			
11.	Kursi Putar	4	b			
12.	Kursi rapat	40	√			
13	Kursi Rapat Pelaris	30			√	

### 2.3. KINERJA PELAYANAN

Dua tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Solor Selatan sejak berdirinya pada Tahun 2010 terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2017 s/d 2018, meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Kecamatan Solor Selatan belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Prasarana dan sarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Solor Selatan yang tersedia memadai sangat membantu aktivitas pelayanan yang cepat, tepat dan memadai. Kondisi prasarana dan sarana pendukung berupa : tanah, gedung kantor dan sarana penunjang lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Asset/Modal Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur**

No	Asset/Modal	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	1000 m <sup>2</sup>	√			
2	Gedung Kantor	-	√			
	Rumah Dinas Camat	-	√			
3	Prasarana dan Sarana Penunjang					
1.	Sepeda Motor	6	√			
2.	Komputer	2	√		√	
3.	Laptop	1	√			
4.	Printer	7	√			
6.	Genset	0				
7.	Meja Kerja	9	√			
8.	Lemari Arsip	9	√			
9.	Lemari Brader	1	b			
9.	Meja rapat	1	√			
10.	Kursi kerja Kayu	4	√			
11.	Kursi Putar	4	b			
12.	Kursi rapat	40	√			
13	Kursi Rapat Pelaris	30			√	

### 2.3. KINERJA PELAYANAN

Dua tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Solor Selatan sejak berdirinya pada Tahun 2010 terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2017 s/d 2018, meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan



4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Solor Selatan**  
**Kabupaten Flores Timur**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penyediaan Surat Menyurat	1				100 %					100 %					100 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur					100 %					100 %					100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran					100 %					100 %					100 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan					100 %					100 %					100 %
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat					100 %					100 %					100 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan					100 %					100 %					100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik					100 %					100 %					100 %

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Solor Selatan**  
**2012 s/d 2016**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	82047440319	-	-	-	789.591.882.40	-	-	-	-	775.167.099.00	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Langsung	-	-	-	-	599.989.000.00	-	-	-	-	595.766.599.00	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	-	69.950.000.00	-	-	-	-	69.930.000.00	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	432.979.000.00	-	-	-	-	428.776.599.00	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Modal	-	-	-	-	97.060.000.00	-	-	-	-	97.060.000.00	-	-	-	-	0 %	-	-

#### 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan permasalahan mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Flores yang luas dan terdiri pulau-pulau serta masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
9. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
10. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
11. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
12. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
13. Income perkapita masyarakat masih rendah;
14. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;



#### 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan permasalahan mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Flores yang luas dan terdiri pulau-pulau serta masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
9. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
10. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
11. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
12. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
13. Income perkapita masyarakat masih rendah;
14. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

15. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembanguan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian, peternakan dan perkebunan

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**KECAMATAN SOLOR SELATAN**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan,



pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Solor Selatan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Solor Selatan**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	Kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	Dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan

					yang belum optimal dan sinergis.
1	2	3	4	5	6
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kehandalan aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Kohesi sosial masyarakat	Berkurang	Tinggi	Pendekatan yang humanis dan profesionalitas aparatur	Solidaritas dan semangat gotongryong	menurunnya tingkat kohesi sosial masyarakat
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparatur	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung ,SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	Program pemberdayaan yang yang menyetuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Pelanggaran hukum;	tinggi	Rendah	Penegakkan hukum tanpa diskrimnasi	Penegakkan hukum tanpa diskrimnasi oleh aparatur penegak huku tingkat atas	Tingginya angka pelanggaran hukum dan penegakkan hukum masih diskriminatif;
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik fomral maupun informal	Etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;



Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
1	2	3	4	5	6
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparatur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Ketersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergagalan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4	Meningkatnya kerjasama antara negara	Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat	(4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	



### 3.2. TELAHAHAN VISI – MISI dan PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

#### VSIS, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 -2025. Visi tersebut adalah Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing Berdasarkan Visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam rpjpd adalah:

- 1).Perekonomian Daerah yang Tangguh
- 2).Pertumbuhan penduduk yang terkendali
- 3).Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 4).Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- 5).Terwujudnya keseimbangan ekosistem
- 6).Meningkatnya ketahanan pangan
- 7).Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

#### 1.1 VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah

***“ Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata “***

Makan dari Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Flores Timur Sejahtera** ; adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. **Desa Membangun Kota Menata** ; adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan peleyanan kemasyarakatan.  
  
Desa Membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang ada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

## 1.2 MISI

Misi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur.

Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat;
4. Reformasi Borokrasi.

**MISI Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur ;** adalah agar pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

**MISI Kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;** adalah agar pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

**MISI Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Tiomur;** adalah agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensi ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

**MISI Keempat Selamatkan Laut Flores Timur;** adalah agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

**MISI Kelima Reformasi Birokrasi;** adalah agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Gavernance dan Clean Goverment dan Clean Government.

Sebagai pelaksana periode ke tiga RPJPD Tahun 205-2025, perumusan visi misi RPJMD Tahun 2017-2022 memperhatikan hubungan antara tujuan dan sasaran RPJP, msis pada RPJMD I dan RPJMD II sebagai Gambar I berikut.

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Kecamatan Solor Selatan berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan

perundangan yang berlaku.

Namun demikian dalam pelaksanaannya selama ini belum didukung dengan adanya anggaran dan sarana prasarana yang memadai, hal ini tampak dalam anggaran yang dikelola sebagaimana telah dipaparkan didepan. Dengan modal semangat dan kerja sama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal.

**Tabel 3.3**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**

**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: " Flores Timur Sejahtera dalam Binkai Desa Membangun Kota Menata"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 :	Selamatkan Orang Muda Flores Timur		
	1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efektivitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan public	Keterbatasan dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meingkatkan kinerja pelayanan publik
	3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur kecamatan	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam memberikan



				pelayanan
	4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tindakan Indisipliner aparat yang masih tinggi	pemberlakuan rewards and punishment yang belum berjalan baik	Adanya regulasi yang terkait dengan disiplin aparat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontroling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik
	6. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pelayanan publik yang belum optimal	Kurangnya dukungan kapasitas SDM, Sarana prasarana, dan SPM dan SOP	Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan mudah

### 3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

#### 1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 – 2027 ( Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033 ); maka Kecamatan Solor Selatan yang baru terbentuk pada tanggal 12 Januari 2010 belum ditetapkan Tata Ruang Wilayah dan Satuan Wilayah Pengembangan. Kriteria sistem perkotaan, Kecamatan Solor Selatan belum termasuk PKL karena belum memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai kawasan perkotaan, yakni berpotensi atau berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kota PKL terdiri atas : Kota PKL-1 yaitu Kota Larantuka sebagai ibukota Kabupaten , Kota PKL-2 yaitu ibukota kecamatan yang

*Renstra Kecamatan Solor Selatan 26*

berkedudukan sebagai pusat SSWP dan Kota PKL-3 yaitu meliputi seluruh kota-kota ibukota kecamatan di Kabupaten .

Berdasarkan hierarki kawasan perkotaan tersebut, maka kecamatan Solor Selatan belum ditetapkan sebagai kawasan perkotaan kecamatan yang tidak memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, maka perkotaan kecamatan tersebut tetap merupakan wilayah inti bagi desa-desa sekitarnya pada tingkat kecamatan. Wilayah perkotaan kecamatan ini juga harus memberikan pelayanan sosial-ekonomi minimal sampai tingkat wilayah administrasi kecamatan itu sendiri seperti halnya wilayah yang berfungsi sebagai pusat SSWP dan jenis pelayanan sosial ekonomi yang seharusnya ada pada masing-masing pusat kecamatan atau ibukota di kecamatan ini diantaranya yaitu pendidikan (tingkat SLTP), kesehatan (tingkat puskesmas) dan sebagainya.

Sesuai dengan penetapan orde/ hierarki perkotaan untuk wilayah Kabupaten Flores Timur, serta konsep dan strategi pengembangan, maka sistem tata ruang di Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Namun untuk Kecamatan Solor Selatan dalam Sub satuan Wilayah Pengembangan.

### **3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai perntayaan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Solor Selatan maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Kecamatan Solor Selatan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

### 3.4.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian tugas yang jelas</li> <li>2. Adanya pedoman dan juknis</li> <li>3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing</li> <li>4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai.</li> <li>5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat.</li> <li>6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja;</li> <li>2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan.</li> <li>3. Sarana prasarana kantor kurang memadai</li> <li>4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun).</li> <li>5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.</li> <li>6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa yang melakukan pelanggaran;</li> <li>7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah desa dalam memberikan pelayanan;</li> <li>8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal;</li> <li>9. Perilaku masyarakat belum mendukung program</li> <li>10. Semakin lemahnya koordinasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan dan pelayanan publik lainnya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota.</li> </ol>

Peluang	Tantangan
---------	-----------



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya.</li> <li>2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan.</li> <li>3. Adanya program utama "Gerbang Emas"</li> <li>4. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab</li> <li>5. Kemajuan teknologi.</li> <li>6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah (adanya program PNPM maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya).</li> <li>7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.</li> <li>8. Semakin *meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.</li> <li>9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah</li> <li>2. Potensi SDA yang belum tergali.</li> <li>3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar.</li> <li>4. Masih tingginya keluarga miskin dan pengangguran</li> <li>5. Berada pada jalur jalan negara dan dekat ibukota kabupaten sehingga rawan kamtibmas.</li> <li>6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik;</li> <li>7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi sebagai akibat karakteristik wilayah kecamatan Demon Pagong, yang sebagian wilayah masih terisolasi fisik.</li> </ol>
--	--

### 3.4.2 Isu-Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical success faktor dengan membagi kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Solor Selatan yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
  - 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT (Anggur Merah) dan Bupati Flores Timur (Gerbang Emas).
  - 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.

- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
  - 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.
  - 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
  - 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
  - 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
  - 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
  - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
  - 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada
  - 4) Memanfaatkan program "anggur merah" dan "gerbang emas" serta PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
  - 5) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi Kecamatan Solor Selatan, strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solor Selatan lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa
3. Memanfaatkan program "Anggur Merah" , "Gerbang Emas" PNPM serta program intervensi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
5. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada



7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
8. Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. VISI DAN MISI KECAMATAN SOLOR SELATAN

Kecamatan Solor Selatan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Flores Timur terdiri dari 7 desa. Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Solor Barat.
- Selatan : Laut Sawu.
- Timur : Kecamatan Solor Timur
- Barat : Kecamatan Solor Barat.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan di desa Kalike; namun untuk sementara berkantor di desa Kalike Aimatean, sambil menunggu penyelesaian pembangunan gedung Kantor Camat.

Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Flores Timur kira – kira 4 Km (transportasi darat) dan 16 mil ( transportasi laut ).

Kondisi jalan raya cukup mendukung pelaksanaan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan untuk 6 desa. Sedangkan untuk desa Sulengwaseng sedang dalam pengerjaan.

Luas wilayah Kecamatan Solor Selatan 31,58.Km<sup>2</sup>.

Topografi wilayah Kecamatan Solor Selatan : dengan kemiringan diatas 30 derajat

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Solor Selatan keadaan 31 Desember 2017; sebanyak : 5.352 Jiwa , terdiri dari : laki – laki : 2.330 Jiwa dan Perempuan : 3.022. Jiwa.

Dengan kondisi wilayah kecamatan Solor Selatan yang demikian, dapat memberikan sedikit gambaran dalam penentuan strategi perencanaan pembangunan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Visi Kecamatan Solor Selatan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yaitu :

**“ FLORES TIMUR SEJAHTERA DALAM BINNGKAI DESA MEMBANGUN KOTA MENAT ”.**

Berdasarkan pada visi Kabupaten Flores Timur di atas, visi Kecamatan Solor Selatan ditetapkan sebagai berikut :

**Pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan berkelanjutan.**

Artinya Pelayanan Publik yang diselenggarakan didukung oleh sumber daya aparatur yang menguasai keseluruhan tugas dan fungsi. Pelayanan Publik dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut :

**1. Profesional dalam pelayanan :**

Pelayanan publik yang diselenggarakan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan publik akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat berkualitas dan sejahtera.

**2. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul :**

Kecamatan Solor Selatan sebagai lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara intensif dan menyeluruh dan



harus mampu bertindak tegas sebagai "motor penggerak" yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

**3. Mendukung kebijakan pembangunan daerah:**

Pelayanan publik harus tetap pada kerangka dan arah kebijakan pembangunan daerah guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan unsur keadilan dan demokratisasi.

**4. Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Cepat, Akurat dan Legal :**

Profesionalisme pelayanan publik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan dilaksanakan menganut prinsip Good Governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses pelayanan publik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

**5. Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkelanjutan :**

artinya perlu dilakukan evaluasi yang diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan yang hasilnya dapat dijadikan sebagai alat ukur perbaikan yang akan selalu diterapkan di masa mendatang.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Kecamatan Solor Selatan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pelaku pembangunan di tingkat kecamatan dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Kecamatan Solor Selatan dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.**
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip Pemerintahan yang Baik dan Bersih.**

Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut:

**Misi Kesatu :**

Pihak kecamatan adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mengedepankan pada pendekatan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

#### Misi Kedua :

Sebagai "motor" penggerak pembangunan di tingkat kecamatan, SDM aparatur pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para penyelenggara pemerintahan baik secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Penerapan prinsip Pemerintahan Yang Baik dan Bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan.

## 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH KECAMATAN SOLOR SELATAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Solor Selatan.

**Tabel 4.1**

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan

Misi 1 :	Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi ,
----------	--

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan prima	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, akurat dan legal	Kondisi pelayanan, kenyamanan kantor, dan pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan legal.	55%	60%	65%	70%	75%	80 %
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip Good Governance and Clean Government</b>								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan umum	55%	60%	65%	70%	75%	80 %
Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik secara baik, cepat dan akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan Dokumen Laporan Keuangan</li> </ul>	55%	60%	65%	70%	75%	80 %

#### 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh kecamatan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kecamatan Solor Selatan, strategi yang ditempuh adalah :

##### a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi



dan program Gubernur NTT (Anggur Merah) dan Bupati Flores Timur (Gerbang Emas).

- 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
- 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
- 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

**b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)**

- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
- 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
- 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

**c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)**

- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada
- 4) Memanfaatkan program "anggur merah" dan "gerbang emas" serta PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.

- 5) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis strategi di atas, maka strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pemerintah kecamatan Solor Selatan, sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : "Pelayanan Publik Yang Prima Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Berkelanjutan"</b>				
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
5. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan prima	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, akurat dan legal.	Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pmda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.	Memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip pemerintahan yang baik dan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk kecamatan dan swadaya

bersih			pokok dan fungsi.	
	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik secara baik, cepat dan akurat	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan Dokumen Laporan Keuangan .	Pelayanan dan pengolahan data serta perencanaan dengan sistem informasi



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Solor Selatan.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat diikuti pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2

RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SOLOR SELATAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 20:

KODE	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Keluaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Kecamatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				519.413.000	APD II			853.722.000
1 06	PROGRAM SKPD		Kalike		270.157.000				568.032.000
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kalike	100%	270.157.000			100%	568.032.000
1 06 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kalike	300 lbr	1.800.000	DPA Kec. Solsel/APD II		467 lbr	2.802.000
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kalike	12 Bln	1.200.000	DPA Kec. Solsel		12 Bln	10.600.000
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Kalike	4 unit	1.600.000	DPA Kec. Solsel		4 unit	500.000
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kalike	12 Bln	15.653.000	DPA Kec. Solsel		12 Bln	25.510.000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kalike	12 Bln	2.000.000	DPA Kec. Solsel		12 Bln	6.250.000
1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kalike	12Bln/31 jenis	8.584.000	DPA Kec. Solsel		12 Bln/27 jenis	48.130.000
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalike	12 Bln	7.100.000	APBD II		12 Bln	17.950.000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kalike	12 Bln	2.000.000	APBD II		12 Bln	11.500.000
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kalike	12 Bln	-	APBD II		12 Bln	1.200.000
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Kalike	12 Bln	11.825.000	APBD II		12 Bln	53.100.000

1	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kecam Solor Selatan Kabupaten Flores Timur	12 Bln	186.600.000	APBD II		12 Bln	293.580.000
1	06	01	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org)	Kalike	12 bln/2 orang	27.652.000	APBD II		7 orang (6 orang administrasi kantor dan 1 orang Klining serfis) /12 Bln	82.910.000
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kalike		112.806.000				144.880.000
2	06	02	7	pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Kalike	2 unit	56.836.000	APBD II		2 unit	41.520.000
2	06	02	10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.	Kalike	Meja kerja=4 unit. Kursi kerja 4 unit. Kursi Rapat 50 unit	17.600.000	APBD II		4 jenis	26.000.000
2	06	02	22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kalike	3 jenis%	25.000.000	APBD II		2 jenis	22.200.000
2	06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	Kalike	2 unit	8.370.000	APBD II		6. unit	20.660.000
1	06	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kalike	1 paket	5.000.000	APBD II		7 jenis	32.500.000
1	06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan		Kalike	3 jenis	-	APBD II		3 jenis	2.000.000
1	20	30	34	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aparatur yang	Kalike		107.750.000				83.610.000
1	20	30	34	2 Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK	Kalike	11 desa	56.800.000			7 desa	47.160.000
					Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Kalike	100%	14.700.000			100%	24.450.000
					Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan kemsyarakatan	Kalike	12 Bulan	12.000.000			12 Bulan	12.000.000
					Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kalike	12 Bulan	24.250.000			12 Bulan	
1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat	Kalike	1 orang	28.700.000	APBD II		4 oarng	57.200.000



1	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kecam Solor Selatan Kabupaten Flores Timur	12 Bln	186.600.000	APBD II		12 Bln	293.580.000
1	06	01	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org)	Kalike	12 bln/2 orang	27.652.000	APBD II		7 orang (6 orang administrasi kantor dan 1 orang Klining serfis) /12 Bln	82.910.000
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kalike		112.806.000				144.880.000
2	06	02	7	pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Kalike	2 unit	56.836.000	APBD II		2 unit	41.520.000
2	06	02	10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.	Kalike	Meja kerja=4 unit. Kursi kerja 4 unit. Kursi Rapat 50 unit	17.600.000	APBD II		4 jenis	26.000.000
2	06	02	22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kalike	3 jenis%	25.000.000	APBD II		2 jenis	22.200.000
2	06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	Kalike	2 unit	8.370.000	APBD II		6. unit	20.660.000
1	06	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kalike	1 paket	5.000.000	APBD II		7 jenis	32.500.000
1	06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan		Kalike	3 jenis	-	APBD II		3 jenis	2.000.000
1	20	30	34	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aparatur yang	Kalike		107.750.000				83.610.000
1	20	30	34	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPB PPK	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPB PPK	Kalike	11 desa	56.800.000			7 desa	47.160.000
					Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Kalike	100%	14.700.000			100%	24.450.000
					Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan kemsyarakatan	Kalike	12 Bulan	12.000.000			12 Bulan	12.000.000
					Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kalike	12 Bulan	24.250.000			12 Bulan	
1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat	Kalike	1 orang	28.700.000	APBD II		4 oarng	57.200.000

1	06	05	01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat	Diluar Propinsi	1 orang	28,700,000	APBD II		4 orang	57.200.000
					BATAS							
1	06	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	Kalike	5 Dokumen		APBD II		5 Dokumen	
1	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	Larantuka	5 Dokumen		APBD II		5 Dokumen	81.159.000
				Urusan Perencanaan Pembangunan								3.091.760.000
1	06	06	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi	Larantuka	1 data base		APBD II			237.000.000
1	06	06	15 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Larantuka	1 data base		APBD II			60.000.000
1	06	06	15 05	Penyusunan Profile	Jumlah Buku profil	Larantuka	50 buku		APBD II			80.000.000
1	06	06	15 06	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Informasi pembangunan daerah secara online	Larantuka	12 bulan		APBD II		50 buku	97.000.000
1	06	06	16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	Larantuka	8 LSM/NGO		APBD II		8 LSM/NGO	245.951.915
1	06	06	16 02	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	Larantuka	8 LSM/NGO		APBD II		8 LSM/NGO	255.000.000
1	06	06	19	Program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan kota- kota besar dan menengah	Larantuka	1 Dokumen		APBD II		1 Dokumen	105.880.000
1	06	06	19 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Larantuka	10 buku		APBD II		10 buku	105.880.000
1	06	06	20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek/pelatihan perencanaan	Larantuka	45 orang		APBD II			75.000.000
1	06	06	20 01	Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana	Bimtek Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Kabupaten Flores Timur	1 Kali		APBD II		-	-
1	06	06	20 02	Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aparat yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah	Larantuka	45 orang		APBD II		45 orang	75.000.000



**TABEL 3.2**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018**

KODE	Prioritas/ Sasaran	Urusan / Program/Kegiatan	Lokasi			INDIKATOR KINERJA						PAGU (Rp)	Perkiraan Maju (Ribu Rupiah)	
			Kecamatan	Desa	Keterangan Lokasi	HASIL PROGRAM		KELUAR KEGIATAN		HASIL PROGRAM/KEGIATAN				
						Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
		KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN												
1	06											3.009.845.100	3.231.135.030	
1	06	01										1.061.887.100	1.088.505.450	
		Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kalike		SKPD	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%						
1	06	01	01											
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Penyediaan jasa surat menyurat	Larantuka		SKPD		350 lembar	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	350 lembar	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat perkantoran	350 lembar	2.100.000	2.500.000
1	06	01	02											
			Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka		SKPD		12 Bln	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bln	18.000.000	25.000.000
1	06	01	06											
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Larantuka		SKPD		6 Unit	Jumlah kendaraan yang dilayani	6 Unit	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	6 Unit	3.000.000	3.000.000
1	06	01	07											
		Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Larantuka		SKPD		12 Bulan/orang	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan/orang	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan SKPD	12 Bulan/orang	21.600.000	21.600.000
1	06	01	08											
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Larantuka		SKPD		12 Bulan	Jumlah layanan jasa kebersihan	12 Bulan	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10.064.850	10.064.850
1	06	01	10											
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Larantuka		SKPD		79 Jenis/12 bulan	Jumlah jenis ATK	79 Jenis/12 Bulan	Terpenuhinya alat tulis kantor	79 Jenis/12 Bulan	63.020.000	50.904.700
1	06	01	11											
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Larantuka		SKPD		12 Bulan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	19.150.000	73.778.100
1	06	01	12											
			Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Larantuka		SKPD		16 Jenis/12 Bulan	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	16 jenis/12 bln	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	16 jenis/12 bln	9.239.250	10.000.000
1	06	01	15											
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Larantuka		SKPD		750 eksempla	Jumlah bahan bacaan	750 eksempla	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	750 eksempla	218.258.000	240.083.800



1	06	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Larantuka		SKPD		1000 dos	Jumlah makan dan minuman	1000 dos	Terpenuhinya makan dan minumkantor	1000 dos	51.625.000	57.577.300
1	06	01	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Larantuka, Provinsi dan Jakarta		SKPD		12 bln	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daam dan luar	12 bln	534.930.000	593.996.700
1	06	01	20		Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Larantuka		SKPD		8 orang	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org)	8 orang	Jasa tenaga teknis perkantoran untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	8 orang	110.900.000	124.200.000
1	06	02		Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Larantuka		SKPD	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%					1.642.122.500	1.644.629.580
1	06	02	9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Solor Selatan		SKPD		8 Jenis	Jumlah pengadaan peralatan gedng kantor	8 Jenis		8 Jenis	114.920.000	200.000.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas	Solor Selatan		SKPD		5 UNIT		5 UNIT		5 UNIT	110.830.000	125.000.000
1	06	02	10		Pengadan Meubeleur	Solor Selatan		SKPD			Jumlah unit mebeleur yang diadakan	-		-	-	200.000.000
					Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Camat	Solor Selatan		SKPD		37 JENIS		37 JENIS		37 JENIS	85.400.000	70.000.000
					Pengadaan Perlengkapan gedung kanto	Solor Selatan		SKPD		1 Paket		1 Paket		1 Paket	25.150.000	26.000.000
1	06	02	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Solor Selatan		SKPD		21 jenis%	Jumlah unit gedung kantor	21 jenis%	Menunjang operasional pelayanan kantor	21 jenis%	36.520.000	40.000.000
2	06	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Solor Selatan		SKPD		6 UNIT	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 unit	Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi secara maksimal untuk mendukung kelancaran	6 unit	160.700.000	170.000.000
1	06	02	26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Solor Selatan		SKPD			Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	18 unit	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	18 unit	9.198.000	11.129.580
1	06	02	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Solor Selatan		SKPD		12 UNIT/12 BLN	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 UNIT/12 BLN	Jumlah pealatan kantor yang berfungsi maksimal untuk menunjang operasional kantor	12 unit/12 bln	9.000.000	10.000.000
					Pengadaan Gedung Aula Pertemuan Kantor Kantor Camat	Solor Selatan		SKPD		1 unit		1 unit		1 unit	600.512.250	620.000.000
					Pembangunan Gedung Tempat Kerja (PATEN)	Solor Selatan		SKPD		1 unit		1 unit		1 unit	359.492.250	37.500.000



						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Solor Selatan		SKPD		1 Paket				1 Paket			1 Paket		130.400.000	135.000.000
						Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemsyarakatan	Solor Selatan													266.585.500	456.500.000
						Pembinaan, Administrasi dan Pelaporan (PAP) P PPKNPM	Solor Selatan		SKPD		1 Paket				1 Paket			1 Paket		58.062.500	60.000.000
						Pekan Panutan Pajak (PBB)	Solor Selatan		SKPD		1 Paket				1 Paket			1 Paket		53.954.500	55.000.000
						Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Solor Selatan		SKPD		1 paket				1 paket			1 paket		36.654.500	40.000.000
						Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan Desa	Solor Selatan		SKPD		7 Orang/12 bln				7 orang/12 bln			7 orang /12 bln		31.750.000	35.000.000
						TIM Penyelenggaraan Lomba Desa	Solor Selatan		SKPD		7 Paket				7 paket			7 paket		14.679.500	150.000.000
						Pembinaan Kader	Solor Selatan		SKPD		1 Paket				1 paket			1 paket		12.979.500	15.000.000
						Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Solor Selatan		SKPD		12 bln/Orang				12 bln/orang			12 bln/orang		58.505.000	60.000.000
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah														39.250.000	41.500.000
						Penyelenggaraan Musrenbangcam	Solor Selatan		SKPD		1 Paket				1 paket			1 paket		39.250.000	41.500.000
						BATAS															
1	06	05				Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Larantuka	Larantuka, Provinsi dan Jakarta	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan	35 Orang									231.982.000	231.982.000
1	06	05	01			Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Larantuka, Provinsi dan Jakarta				Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	35 orang	Jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi dalam perencanaan dan penganggaran	35 orang			35 orang		231.982.000	231.982.000
1	06	06				Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Larantuka	SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian	80 buku			80 buku			80 buku			57.912.000	57.912.000
1	06	06	01			Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Larantuka			80 buku	Jumlah buku dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	80 buku	Jumlah buku sebagai acuan perencanaan SKPD Tahun 2018	80 buku			80 buku		57.912.000	57.912.000
						Urusan Perencanaan Pembangunan	Urusan Perencanaan Pembangunan													3.447.662.300	3.905.549.260
1	06	06	15			Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Program Pengembangan Data/Informasi	Larantuka	Larantuka, Kupang	Presentase cakupan pengembangan	100%									356.260.300	391.886.330

TABEL 3.2

## RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017

KODE	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Keluaran Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
			Kecamatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN					1.194.152.330	1.194.152.330			2.625.729.363		
1 06	PROGRAM SKPD		KALIKE		643.607.330				682.549.863		
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kalike	70%				100%	682.549.863		
1 06 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kalike	12 Bln	2.802.000	APBD II		12 Bln	2.100.000	280.200	3.082.200
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kalike	12 Bln	10.600.000	APBD II		12 Bln	18.000.000	1.060.000	11.660.000
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Kalike	12 Bln	500.000	APBD II		12 Bln	3.000.000	50.000	550.000
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kalike	12 Bln	25.510.000	APBD II		12 Bln	21.600.000	2.551.000	28.061.000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kalike	12 Bln	6.250.000	APBD II		12 Bln	10.064.000	625.000	6.875.000
1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kalike	12 Bln	48.130.000	APBD II		12 Bln	63.020.000	4.813.000	52.943.000
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalike	12 Bln	17.950.000	APBD II		12 Bln	19.150.000	1.795.000	19.745.000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kalike	12 Bln	11.500.000	APBD II		12 Bln	9.239.000	1.150.000	12.650.000
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kalike	12 Bln	7.865.330	APBD II	tidak ada di dpa atau rka	12 Bln	8.651.863	786.533	8.651.863
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Kalike	12 Bln	53.100.000	APBD II		12 Bln	51.625.000	5.310.000	58.410.000
1 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah , luar daerah dan Propinsi	Kecamatan Solor Selatan, Larantuka Provinsi	12 Bln	293.580.000	APBD II		12 Bln	365.200.000	29.358.000	322.938.000
1 06 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org)	Kalike	7 orang	82.910.000	APBD II		8 orang	110.900.000	8.291.000	91.201.000
1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kalike		403.735.000				1.504.594.500		



				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas		2 unit	41.520.000			6 unit	110.900.000		
1	06	02	7	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Kantor	Kalike	1 paket	26.000.000	APBD II		-	25.150.000		
1	06	02	9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Kalike	2 jenis	22.200.000	APBD II		-	114.920.000		
1	06	02	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	Kalike	1 paket	250.000.000	APBD II		-	-		
1	06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Terpeliharanya gedung kantor	Kalike	1 gedung	32.500.000	APBD II		1 gedung	36.520.000	3.250.000	35.750.000
2	06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	Kalike	6 unit	20.660.000	APBD II		11 unit	160.700.000	2.066.000	81.804.000
1	06	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kalike	7 jenis	8.855.000	APBD II		7 jenis	9.000.000	805000	9.660.000
1	06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kalike	3 jenis	2.000.000	APBD II		3 jenis	2.000.000		
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan	Kalike						85.400.000		
				Pembangunan Gedung Aula Pertemuan Kantor	Tersedianya Tanah dan Bahan Bangunan Aula Pertemuan Kantor	Kalike					1 unit 12x22 m	600.512.250		
				Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya Tanah dan Bahan Bangunan Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Camat	Kalike					1 unit 10x15	359.492.250		
				Penggalan Sumur air di bawah tanah		Kalike					1 Paket	60.000.000		
1	06			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat	Larantuka, Provinsi dan Jakarta	23 orang	57.200.000	APBD II			130.400.000		
1	06	05	01	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat	Larantuka, Provinsi dan di luar Propinsi	23 orang	57.200.000	APBD II		23 orang	130.400.000	20085000	220.935.000
4	1	30	34	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Tersedianya Koordinasi pelayanan masyarakat	Kecamatan dan Larantua	12 bln	89.610.000				308.185.000		
				Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPMPK	Tersedianya tenaga administrasi dan pelaporan PPK	Kalike	3 orang	47.160.000				58.062.500		
				Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Tersedianya saran dan prasarana musrenbang	Kalike	1 kali	24.450.000				39.250.000		
				Pekan Panutan Pajak		Kalike								
				Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Tersedia Tenaga Forkopimcam	Kalike					7 Desa 3Orang	53.954.500 36.654.000		
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Sosial Masyarakat	Tersedianya Tenaga Forkopimcam	Kalike	3 Orang	18.000.000						

				Pendamping dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Tenaga Pendamping dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kalike				9 orang	31.750.000
				Tim Penyelenggaraan Lomba Desa	Tersedianya Tenaga Penyelenggaraan Lomba Desa	Kalike				7 Desa	14.679.500
				Pembinaan Kader Posyandu						7 Desa	15.329.500
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Tersedianya Tenaga dan Peralatan Gedung Paten	Kalike				7 orang dan barang dan jasa	58.505.000
					FINIS						FINIS
1	06	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya		7 Dokumen	55.154.000	APBD II	5 Dokumen	81.159.000
1	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	Larantuka	7 Dokumen	55.154.000	APBD II	5 Dokumen	81.159.000
				Urusan Perencanaan Pembangunan	BATAS			3.774.045.650			3.091.760.000
1	06	06	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi	Larantuka	1 data base		APBD II		237.000.000
1	06	06	15 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Larantuka	1 data base	136.397.800	APBD II		60.000.000
1	06	06	15 05	Penyusunan Profile	Jumlah Buku profil	Larantuka	50 buku	91.905.000	APBD II		80.000.000
1	06	06	15 06	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Informasi pembangunan daerah secara online	Larantuka	12 bulan	73.010.300	APBD II	50 buku	97.000.000
1	06	06	16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	Larantuka	10 LSM/NGO	116.653.350	APBD II	8 LSM/NGO	245.951.915
1	06	06	16 02	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	Larantuka	10 LSM/NGO	116.653.350	APBD II	8 LSM/NGO	255.000.000
1	06	06	19	Program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan kota- kota besar dan menengah	Larantuka	1 Dokumen	197.639.000	APBD II	1 Dokumen	105.880.000
1	06	06	19 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Larantuka	10 buku	197.639.000	APBD II	10 buku	105.880.000
1	06	06	20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan perencanaan	Larantuka	45 orang	150.000.000	APBD II		75.000.000
1	06	06	20 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana							
1	06	06	20 02	Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah	Larantuka	45 orang	150.000.000	APBD II	45 orang	75.000.000

5.014.000 55.154.000

12399800 136.397.800

8355000 91.905.000  
6637300 73.010.300

10604850 116.653.350



Tabel 5.1  
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,  
Dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode				
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan prima.	terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, akurat dan legal	Kondisi pelayanan, kenyamanan kantor, dan pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan legal	1	6	1																
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi penunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100%	70%	80%		100%		100%	230.939.000	100%	239.995.000	100%	1.102.058.000			
			1	6	1	1															
					Penyediaan jasa surat menyurat	Dokumentasi Surat Masuk dan Keluar	100%	70%	28.02.000	100%	2.100.000	100%	28.000.000	100%	28.200.000	100%	28.000.000	100%	2.800.000		
			1	6	1	2															
					Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	10.600.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.250.000	12 Bulan	20.300.000	100%	20.500.000		
			1	6	1	6															
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas	4 unit	6unit	500.000	11 unit	3.000.000	11 unit	600.000	11 unit	700.000	11 unit	800.000	100%	3.300.000		Ktr Camat



1	6	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	3 org	3 org	25.510.000	3 org	21.600.000	3org	11.200.000	3 org	12.300.000	3 org	13.500.000	3 org	57.400.000		
1	6	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan alat-alat kebersihan kantor	16 jenis/thn	16 jenis/thn	6.250.000	16 jenis/thn	10.064.850	16 jenis/thn	11.000.000	16 jenis/thn	12.000.000	16 jenis/thn	13.000.000	16 jenis/thn	14.000.000		
1	6	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	71 jenis ATK/thn	71 jenis ATK/thn	48.130.000	100 jenis ATK/thn	63.020.000	100 jenis ATK/thn	64.000.000	100 jenis ATK/thn	65.000.000	100 jenis ATK/thn	66.000.000	100 jenis ATK/thn	67.000.000		
1	6	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 lbr/bln	100 lbr/bln	17.950.000	100 lbr/bln	19.150.000	100 lbr/bln	20.000.000	100 lbr/bln	21.000.000	100 lbr/bln	22.000.000	100 lbr/bln	23.000.000		
1	6	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Pembelian alat/komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	8 bh/jenis/thn	10 bh/jenis/thn	11.500.000	10 bh/jenis/thn	9.239.250	10 bh/jenis/thn	12.500.000	10 bh/jenis/thn	12.700.000	10 bh/jenis/thn	12.600.000	10 bh/jenis/thn	12.650.000		
1	6	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi Rapat dan Tamu	91 porsi/bln	200 porsi/bln	53.100.000	200 porsi/bln	51.625.000	200 porsi/bln	52.500.000	200 porsi/bln	52.600.000	200 porsi/bln	52.700.000	200 porsi/bln	52.800.000		
1	6	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan propinsi	Jml Rapat Koordinasi/Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan	900 OH/thn	900 OH/thn	293.580.000	1000 OH/thn	365.200.000	1000 OH/thn	50.100.000	1000 OH/thn	53.700.000	1000 OH/thn	55.000.000	1000 OH/thn	253.800.000		

			1	6	1	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Jml Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	2 org	7 org	82.910.000	8 orang	110.900.000	9 org	124.200.000	10 org	138.000.000	11 org	151.800.000	12 org	165.600.000			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan umum	1	6	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	62%	70%		68%		72%		76%		80%		80%				
							Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor		2 unit%	100%	41.520.000	5 unit%	110.830.000	1 unit%	23.000.000	1 unit	26.000.000	1 unit%	27.000.000	1 unit	28.000.000			
							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 unit	80%	26.000.000	70%	25.150.000	75%	25.500.000	76%	26.500.000	77%	27.500.000	80%	28.500.000			
							Pengadaan Rumah Jabatan Dinas Kantor	Tersedianya rumah jabatan Camat	0%	0%	0	75%	85.400.450	76%	85.500.000	77%	85.600.000	78%	85.700.000	80%	85.800.000			
			1	6	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor		80%	7 jenis	22.200.000	80%	114920000	1 unit	1149300000	77%	1149400000	78%	1149500000	80%	1149600000		







2	6	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan dan perbaikan gedung kantor	1 unit gdg	1 unit gdg	32.500.000	1 unit gdg	36.520.000	3 unit gdg	36.530.000	3 unit gdg	36.540.000	3 unit gdg	36.550.000	3 unit gdg	36.600.000		
					Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Kantor		6 unit	80%	20660000	11 unit	160700000	11 unit	160700000	12	160800000	13	160900000	14	170000000		
					Pembangunan Gedung Aula Pertemuan Kantor	Terwujudnya pertemuan kantor yang nyaman	0	0%	0	1 unit	600.512.250	1 unit	600700000	1	600800000	1	600900000	1	600950000		
					Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terwujudnya Pelayanan Prima	0	0%	0	1 unit	359.492.250	1	359500000	1	359600000	1	359700000	1	359800000		
1	6	1	2	25	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Service Komputer	1 unit	75%	2000000	1 unit	9000000	76%	9500000	77%	9700000	78%	9800000	80%	99000000		
1	6	1	6		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Diklat Perencanaan dan Penganggaran/memiliki sertifikat															

Upaya  
 pengelolaan  
 dan pemantauan data dan informasi dan komunikasi dalam pelayanan

Tersedianya pelayanan dan pemantauan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik

Tersedianya dokumen Renstra, RAKIP, LKIP dan Laporan Keuangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan umum	1	6	1	6	1	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran	15 orang	75	57200000	76%	130.400.000	77%	130.500.000	78%	130.600.000	79%	130.700.000	80%	130.800.000		
			1	6	1	2		Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	62%	70%													
								Pembinaan, Administrasi dan pelaporan (PAP) PNPMP PPK		75%	76%	47.160.000	76%	58.062.500	77%	58.150.000	78%	58.200.000	79%	58.300.000	80%	58.400.000		
								Pekan Panutan Pajak (PBB)		0%	0%	0	12 BLN	53.954.500	76%	54.000.000	77%	55.000.000	78%	56.000.000	80%	57.000.000		
						Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOM)		0	0%	0%	0	70%	36.654.000	76%	37.000.000	77%	38.000.000	78%	39.000.000	80%	39.500.000			

					Pendampingan fasilitasi dan pengelolaan keuangan Desa	0	0%	0%		0	70%	31.750.000	75%	31.800.000	76%	31.900.000	77%	32.000.000	80%	32.500.000		
					TIM penyelenggaraan Lomba Desa	0	0%	0%		0	70%	14.675.500	75%	15.000.000	76%	15.200.000	77%	15.500.000	80%	15.800.000		
					Pembinaan Kader Posyandu	0	0%	0%		0	70%	15.329.500	75%	16.000.000	76%	17.000.000	77%	18.000.000	80%	19.000.000		
					Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	0	0%	0%		0	70%	58.505.000	75%	58.700.000	76%	58.800.000	77%	58.900.000	80%	59.000.000		
					Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	76	1 Paket	80%	24.450.000	75%	39.250.000	76%	40.000.000	77%	40.500.000	78%	40.600.000	80%	41.000.000			
					Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Sosial Masyarakat	76%	1 Paket	80%	12.000.000	75%	13.000.000	76%	13.500.000	77%	13.750.000	78%	13.800.000	80%	14.000.000			



Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi dan komunikasi dalam pelayanan public	Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan public secara baik, cepat dan akurat	Tersedianya dokumen Renstra, LAKIP, LPPD dan Dokumen Laporan Keuangan				Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	76%	1 Paket	75	24.250.000	75%	31.750.000	76%	32.000.000	77%	33.000.000	78%	34.000.000	80%	35.000.000				
						BATAS																		
			1	6	1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	5 dokumen	5 Dok	15.000.000	5 Dok	15.000.000	5 Dok	21.700.000	5 Dok	22.400.000	5 Dok	23.000.000	5 Dok	97.100.000			
			1	6	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA	5 dokumen	5 Dok		5 Dok	10.000.000	5 Dok	12.750.000	5 Dok	11.402.500	5 Dok	11.074.575	5 Dok	45.227.075		
			1	6	1	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan	4 dokumen				3.000.000		5.000.000		6.000.000		6.500.000		20.500.000		
			1	6	1	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen				2.000.000		4.000.000		5.000.000		5.500.000		16.500.000		

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kecamatan Solor Selatan sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
6	Penyediaan ATK	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
7	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
8	Penyediaan Komponen instasi listrik dan penerangan kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
9	Penyediaan makanann dan minuman	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
11	Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah luar daerah dan propinsi	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
12	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
13	Pengadaan kendaraan dinas kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
15	Pengadaan rumah jabatan dinas camat	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%



17	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
18	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
19	Pembangunan gedung aula pertemuan kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
20	Pembangunan gedung kantor pelayanan terpadu Paten	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
21	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
22	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
23	Pembinaan administrasi dan pelaporan (PAP)PNPM PPK	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
24	Pekan panutan pajak PBB	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
25	Forum pimpinan kecamatan (FORKOM)	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
26	Pendampingan Fasilitasi dan pengelolaan keuangan Desa	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
27	TIM Penyelenggaraan lomba Desa	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
28	Pembinaan kader POSYANDU	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
29	Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
30	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
31	Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan sosial kemasyarakatan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
32	Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
33	Dokumen Laporan Keuangan,LAKIP, LPPD,RENJA, RENSTRA	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
34	Dokumen Laporan Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
35	Dokumen Laporan Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%



17	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
18	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
19	Pembangunan gedung aula pertemuan kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
20	Pembangunan gedung kantor pelayanan terpadu Paten	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
21	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
22	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
23	Pembinaan administrasi dan pelaporan (PAP)PNPM PPK	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
24	Pekan panutan pajak PBB	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
25	Forum pimpinan kecamatan (FORKOM)	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
26	Pendampingan Fasilitasi dan pengelolaan keuangan Desa	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
27	TIM Penyelenggaraan lomba Desa	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
28	Pembinaan kader POSYANDU	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
29	Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
30	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
31	Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan sosial kemasyarakatan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
32	Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
33	Dokumen Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
34	Dokumen Laporan Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
35	Dokumen Laporan Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dengan telah disepakatinya visi, misi dan tujuan Kecamatan Solor Selatan yang terangkum dalam Rencana Strategis ini, Kecamatan Kecamatan Solor Selatan berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Solor Selatan. Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Kerja ( Renja ) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Kantor Camat Kecamatan Solor Selatan yang telah ditetapkan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kecamatan Solor Selatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikianlah dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Solor Selatan Tahun 2017-2018 ini dibuat, untuk dipedomani dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean goverment.

Kalike, ..... 2017

**Camat Solor Selatan,**

**Yoseph Damian Klodor, S.Sos**

Pembina Tk.I

NIP. 19660220 199903 1 003